

2. FUNGSI KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pokok-pokok kegiatan meliputi : Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; Azas umum dan struktur APBD; Penyusunan rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Pengelolaan Kas; Penatausahaan keuangan daerah; Akuntansi keuangan daerah; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Kerugian daerah; Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pendapatan daerah sebagai penambahan nilai kekayaan bersih adalah hak pemerintah daerah yang diakui yang sesuai dengan kewenangan, terdiri dari pendapatan dari perimbangan / tranfer pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah pada Provinsi Jawa Tengah berkisar 55% dari total pendapatan sebagian besar masih bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pendapatan daerah dibelanjakan untuk membiayai belanja program program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana kerja Pemerintah Daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Pembiayaan daerah, merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Prestasi atau penghargaan yang diterima di bidang keuangan yaitu Penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Republik Indonesia.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Fungsi Keuangan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah yang terdistribusi ke dalam 164 indikator kinerja program. Perincian ketercapaian dari 164 Indikator tersebut disajikan dalam lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Keuangan L-I.C.2.1-17.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Keuangan L-I.C.2.1-17 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memiliki 159 indikator, tingkat ketercapaiannya sebanyak 148 indikator (93,08%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan tinggi, 4 indikator (2,51%) memiliki tingkat ketercapaian sedang, dan 7 indikator (4,40%) memiliki tinggi ketercapaian rendah dan sangat rendah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 4 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi, dan 3) Program Pengelolaan Aset Daerah memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 164 indikator terdapat 153 indikator (93,29%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan tinggi, 4 indikator (2,43%) memiliki tingkat

ketercapaian sedang, dan 7 indikator (4,26%) memiliki tingkat ketercapaian rendah dan sangat rendah. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	159	145	3	4	2	5
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	4	4	-	-	-	-
3	Pengelolaan Aset Daerah	1	1	-	-	-	-
	Jumlah	164	150	3	4	2	5

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memiliki 159 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian 145 indikator tercapai sangat tinggi, 3 indikator tercapai tinggi, 4 indikator tercapai sedang, 2 indikator tercapai rendah dan 5 indikator tercapai sangat rendah.

Indikator kinerja program yang tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, antara lain: Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah dengan realisasi 95% sesuai target; Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara dengan realisasi 6,41% melebihi dari target 6,04%; Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi 9,98% sesuai target; Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok dengan realisasi 7,42% sesuai target; dan Persentase peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPPD Kabupaten Banjarnegara dengan realisasi 16,21% melebihi dari target 15%.

Indikator kinerja program yang tingkat ketercapaiannya tinggi, antara lain: Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen dengan realisasi 13,21% dari target 15,37%, Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal dengan realisasi 2,27% dari target 2,53% dan Persentase peningkatan penerimaan PAP dengan realisasi 12,06% dari target 15,17%.

Indikator kinerja program yang tingkat ketercapaiannya sedang, antara lain: Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri dengan realisasi 8,44% dari target 12,6%, Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen dengan realisasi 10,65% dari target 15%,

Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri dengan realisasi 11,25% dari target 15%, dan Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Surakarta dengan realisasi 7,41% dari target 10,59%.

Indikator kinerja program yang tingkat ketercapaiannya rendah, antara lain: Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora dengan realisasi 6,75% dari target 11,07% dan Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 6,87% dari target 10,79%. Hal ini disebabkan pajak BPNKB bergantung pada daya beli masyarakat sehingga tidak bias dikendalikan.

Indikator kinerja program yang memiliki tingkat ketercapaian sangat rendah yaitu ada 5 indikator, antara lain Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Jepara, Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Pekalongan, Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang I, Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Tegal dan Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus dengan realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena tidak obyek Pajak Air Permukaan (PAP).

Manfaat diselenggarakannya Program ini, yaitu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari peningkatan pajak daerah, peningkatan retribusi daerah, peningkatan laba dari BUMD dan pendapatan lain yang sah dan mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki 4 indikator kinerja program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase penetapan APBD tepat waktu dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase realisasi serapan APBD dengan realisasi 93% melebihi target 92%.

Manfaat diselenggarakannya program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Program Pengelolaan Aset Daerah, memiliki indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pemanfaatan aset daerah dengan realisasi 62,5% sesuai target.

Manfaat diselenggarakannya program yaitu untuk pendayagunaan secara optimal aset-aset Provinsi Jawa Tengah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Keuangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp281.478.419.000,00 dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp194.461.893.000,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp87.016.526.000,00 yang terdistribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk membiayai pelaksanaan 3 program dengan realisasi fisik sebesar 99,89% dan keuangan 94,69%.

1) Belanja Langsung

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp55.466.162.000 dengan realisasi fisik sebesar 99,82 % dan keuangan 95,21%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB dengan keluaran tersusunnya dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB sebanyak 1 dokumen; Kegiatan Pendataan dan penagihan piutang PKB dengan keluaran persentase penurunan tunggakan PKB sebesar 90%; Kegiatan Penyusunan perencanaan pajak lain-lain dengan keluaran tersusunnya dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok sebanyak 1 dokumen; Kegiatan Penyusunan perencanaan retribusi daerah dengan keluaran tersusunnya dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan sebanyak 1 dokumen dan Kegiatan Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain dengan keluaran tersusunnya dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah sebanyak 1 dokumen.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp22.711.546.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,48%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan sebanyak 41 OPD, Jumlah OPD lingkup bidang Ekbang yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan sebanyak 41 OPD dan Jumlah OPD lingkup bidang Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan sebanyak 41 OPD; Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dengan keluaran 35 Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan; Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan keluaran Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D sebanyak 41 OPD, Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D sebanyak 41 OPD, Jumlah OPD lingkup bidang Kesra yang terlayani penerbitan SP2D sebanyak 41 OPD; Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan keluaran Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan sebanyak 41 OPD dan Jumlah OPD lingkup bidang Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan sebanyak 41 OPD.

Program Pengelolaan Aset Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp8.778.818.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,14%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dengan jumlah asset yang dimanfaatkan dan dokumen kajian pemberdayaan asset sebanyak 4 unit, Kegiatan Penataan BMD dengan jumlah asset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutase BMD di 43 OPD, Kegiatan Pengamanan Aset Daerah dengan jumlah asset yang diamankan sebanyak 41 unit dan Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset

dengan jumlah asset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketanya sebanyak 5 unit.

2) Realisasi Belanja Tidak Langsung (Hibah dan Bansos)

Belanja Hibah pada urusan Keuangan diampu oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada Kanwil Ditjen Bea Cukai Jateng DIY dengan realisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (100%). Hibah dimaksud digunakan untuk kegiatan operasional dalam pemberantasan cukai rokok illegal.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai-mana Lampiran: L-II.C.2.1-11.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Keuangan pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 2 hal yaitu :

1). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :Perlu Inventarisasi penggunaan lahan bondo desa dan PT. KAI yang digunakan untuk pendirian SMA/SMK dalam rangka Pembebasan Lahan dimaksud. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan permohonan pinjam pakai ke PT. KAI (Persero) di Bandung dengan Surat Sekda Nomor : 030/02787 tanggal 11 Pebruari 2019 yang sampai saat ini belum ada balasan atas surat tersebut.Sedangkan untuk Tanah Kas Desa(TKD)/Bondo Desa sedang dilakukan indentifikasi dan validasi dengan hasil sementara yaitu sertifikasi bagi yang sudah mulai proses tukar menukar dan menyusun daftar prioritas untuk yang belum dilakukan tukar menukar.

2). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan Sosialisasi kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan bersama TP KK di 6 Kabupaten se Jawa Tengah terkait penanganan tunggakan Pajak Kendaraan, Sosialisasi / Promosi di Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial dan Media Luar lainnya, Sosialisasi / Promosi dengan memberikan reward kepada WP yang taat membayar Pajak Kendaraan dan Sosialisasi pada acara-acara yang dilaksanakan bersama Tim Pembina Samsat.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Masih banyak potensi obyek yg belum terdata menjadi wajib pajak.
- 3) Masih ada badan usaha yg belum tertib dalam pemungutan & pembayaran PBBKB.
- 4) Masih ada peredaran BBM ilegal di wilayah Jateng, akan mengurangi potensi penerimaan PAD.

- 5) Masih ditemukan peredaran rokok ilegal di Jawa tengah, yg akan mengurangi potensi penerimaan PAD.
- 6) Penerimaan RTPHH tidak dapat mencapai target karena PERHUTANI menurunkan target penjualan melalui tempat pelelangan dari 15% menjadi 5% dan minat pembeli menurun lebih memilih sistem online.
- 7) Minimnya informasi kepemilikan aset dan penguasaan aset oleh piak yang tidak bertanggung jawab.
- 8) Kontribusi penerimaan dari pajak yang masih mendominasi dalam PAD dan belum optimalnya sumber-sumber pendapatan selain pajak.

Solusi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- 2) Meningkatkan koordinasi dg dinas teknis utk melakukan pengawasan & pendataan objek
- 3) Bekerja sama dg seluruh stakeholder BBM melakukan sosialisasi kpd badan usaha ttg kepatuhan dlm pemungutan & pembayaran PBBKB
- 4) Menggali info daerah yg banyak peredaran BBM ilegal, utk dilakukan penindakan dg aparat berwenang
- 5) Bekerjasama dg bea cukai dlm kegiatan penindakan rokok ilegal.
- 6) Berkoordinasi dengan PERHUTANI agar bs mendukung pencapaian target penerimaan dengan mencari solusi lain dlm penjualan misal merealisasikan rencana penjualan kayu dengan sistem paket (jati & sonokeling).
- 7) Pemasangan papan, pathok dan pagar, sertifikasi kepemilikan serta meningkatkann promosi dan kerjasama dan pemanfaatan aset.
- 8) Melakukan penyesuaian tarif pada beberapa retribusi daerah yang disesuaikan dengan perekonomian saat ini, revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset milik pemerintah sebagai upaya menggali potensi yang mendukung penerimaan retribusi daerah, serta meningkatkan pengawasan/pembinaan terhadap BUMD dan memperkuat struktur permodalan BUMD melalui penyertaan modal, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.